



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

**LAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(O P D)
TAHUN ANGGARAN 2019**

PAINAN, 06 JANUARI 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggung jawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2019, sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan disempurnakan dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka disusunlah laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahunan ini, masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai untuk penyempurnaannya dimasa yang akan datang.

Painan , 31 Desember 2019.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



**MUKHRIDAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196401281993091001**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	IV
NERACA	V
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	VI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	
BAB I PENDAHULUAN	
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	5
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
BAB II EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN/PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
1. Ekonomi Makro.....	8
2. Kebijakan Keuangan.....	8
3. Pencapaian Target Kinerja APBD	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	24
a. Pendapatan.....	24
b. Belanja.....	26
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	28
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	28
2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	29
3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	30
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	34
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	38
2. Neraca	42
Bab VI PENUTUP	
1. Saran.....	50
2. Kesimpulan.....	50
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	II
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang yaitu : Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan

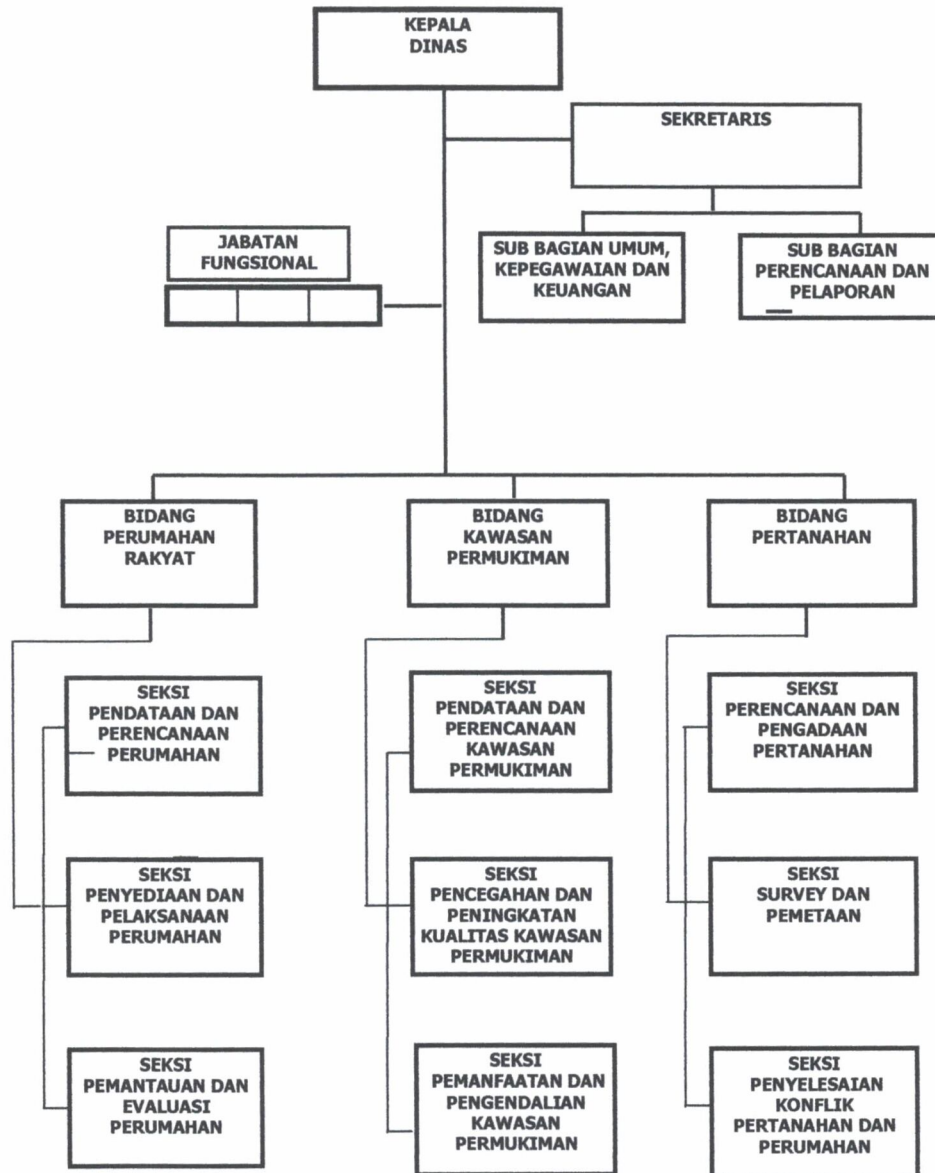
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan , menyatakan bahwa Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah “ **Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan bidang Infrastruktur Sarana dan Prasarana**”.

Sedangkan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kemasyarakatan dan Infrastruktur
Perumahan Masyarakat dan Kawasan Permukiman.
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu **Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu**.

Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) BAB dan setiap BAB berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
Yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

4.2. Basis Akuntansi

4.3. Basis Pengukuran

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

6.2. Saran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan / pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan pemerintah dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menyelenggarakan kewenangan daerah urusan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan beberapa langkah :

- Memaksimalkan hasil kegiatan dibidang Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan.
- Meningkatkan sumber daya aparatur keuangan
- Meningkatkan mutu Bangunan Gedung, Kawasan permukiman, perumahan dan pertanahan.
- Meningkatkan pelayanan umum bidang Infrastruktur

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan Keuangan yang diambil yaitu Kebijakan Aspek Belanja, dimana kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui efisiensi dengan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing Program dan Kegiatan Seperti :

- Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Peningkatan Efisiensi dan Effektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk keperluan masyarakat
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-OPD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

Misal :

Program : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : Pembangunan Drainase Permukiman.

Contoh :

Input Dana = Rp. 187.000.000,-

Target Kinerja = 1. Dikerjakan oleh Rekanan dan dibantu 1 orang Pengawas Lapangan
2. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Dinas Perkimtan.

Keberhasilan = Terciptanya Efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Pekerjaan, baik administrasi keuangan, Maupun Teknis Di lapangan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektifitas dan efesiensi) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk tabel atau grafik.

3.2. Hambatan & Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang telah dilaksanakan berkaitan dengan proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah, memerlukan pemahaman lebih lanjut dari pihak yang terkait.

Begitu juga dengan sistem pembayaran, pada tahun 2019 sistem pembayaran dengan sistem non tunai sehingga pada awal-awal tahun pembayaran dana kegiatan agak terganggu sedikit, namun dengan berjalannya waktu sistem pembayaran sudah lancar.

Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 baru diterima Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan pada pertengahan Tahun 2019. Hal ini tidak mempengaruhi akan terjadinya pencairan dan pelaksanaan kegiatan bahkan ada kegiatan yang sudah Siap 100 % sebelum Tahun anggaran berakhir.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Kuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus bagi OPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

Adapun Program dan Kegiatan TA. 2019 Pada Dinas Perkimtan :

No	Uraian
a	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran (12 Kegiatan)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan alat tulis kantor
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
5	Penyediaan makanan dan minuman
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7	Rapat-rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
B	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (5 Kegiatan)

	1	Pengadaan Meobiler
	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
	6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
C		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	1	Monitoring evaluasi dan pelaporan
	2	Sinkronisasi program RPJM cipta karya
D		Program lingkungan sehat perumahan
	1	Pembangunan infrastruktur sanitasi
	2	Penunjang pembangunan infrastruktur sanitasi
	3	Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum)
F		Program pengembangan perumahan
	1	Penunjang perumahan permukiman dan BSPS
	2	Pematangan lahan lokasi rumah tapak
	3	Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan
	4	Pendataan dan validasi data rumah tidak layak huni
	5	Rehabilitasi rumah tidak layak huni
	6	Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	7	Penunjang Pembnagunan Rumah Khusus Nelayan
	8	Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni
	9	Fasilitasi Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah
G		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan
	2	Pembangunan Jalan Minapolitan madeh
H		Program Saluran Drainase/Gorong-gorong
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman
I		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
	1	Pembangunan Gedung kantor
	2	Pembangunan Rumah Dinas
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

J		Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
	1	Perencanaan pengadaan tanah
	2	Persiapan pengadaan tanah
	3	Pelaksanaan pengadaan tanah
	4	Penyerahan hasil pengadaan tanah
	5	Fasilitasi pengadaan tanah
	6	Inventarisasi tanah pemerintah daerah
	7	Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah
	8	Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
K		Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	1	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan Permukiman
	2	Penataan Kawasan Kumuh
	3	Penyusunan DED Kawasan Kumuh
	4	Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	5	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh
	6	Penunjang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
	7	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kab.Pesisir Selatan
L		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
	1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan
M		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
	1	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal
N		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	1	Pelaksanaan Promosi dan Publikasi

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu : Basis Akrua (Accrual Basis). Pada Cash Accrual Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan. Accrual basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi OPD Accrual basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu Accrual basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapakan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerinah

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah belum dilakukan penyusutan
BELUM SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH

Bagi OPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegaskan dari Kepala Daerah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja yang dapat kita lihat pada Laporan Realisasi Anggaran TA. 2019 yang Terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Dianggarkan Sebesar **Rp. 4.223.932.225,-** terealisasi **Rp. 4.055.013.852,-**

Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.849.071.635	1.831.863.552	17.208.083	99.06
Tambahan Penghasilan PNS	848.510.590	835.300.300	13.210.290	98.44
Honorarium PNS dan Non PNS	1.526.350.000	1.387.850.000	138.500.000	90.92
Total	4.223.932.225	4.055.013.852	168.918.373	96.00

Gaji dan tunjangan pegawai mencakup rincian gaji dan tunjangan masing-masing pegawai, di lingkup jajaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019. Pada Tabel 1 terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 17.208.083,-. Kelebihan ini disebabkan perencanaan penganggaran. Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan menganggarkan rapel PNS tahun 2019. Penghasilan PNS berupa Tambahan Penghasilan Bagi PNS untuk pegawai di lingkup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tabel terlihat terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp 13.210.290,- Hal ini disebabkan tidak adanya kenaikan Gaji dan Tunjangan pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Honorarium PNS dan Non PNS meliputi Honorarium yang menunjang kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada umumnya belanja modal pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dari Januari s/d 31 Desember 2019 (100 %.) untuk belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan 100,00 % untuk belanja Modal .

2. Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk OPD hanya terdiri dari atas :

a. Aset Lancar

ASET LANCAR :	2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0
Piutang cadangan persediaan tahun 2019	0
Persediaan	242.721.650
R/K (M) BUD	0
Jumlah Aset Lancar	242.721.650

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, sisa dana yang berada pada pos kas di bendahara pengeluaran Turun dengan signifikan. Kas di bendahara pengeluaran pada tahun 2018 adalah Rp. 1.642.550,- (Sisa UYHD) dan pada tahun 2019 adalah Rp. 46.685,-. (Sisa UYHD) Hal ini terjadi karena permintaan dana disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kas tidak begitu banyak di kas bendahara pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Seluruh kegiatan sudah berjalan dan pertanggung jawabannya telah dipenuhi.

• Tanah

Saldo akhir tahun 2018 tanah sebesar	Rp. 7.738.073.978,-
Penambahan asset tanah tahun 2019	Rp. 846.081.347,-
Sehingga aset tanah s/d desember 2019 sebesar	Rp.8.584.155.325,-

- **Peralatan dan Mesin**

Saldo akhir tahun 2018 Peralatan Mesin sebesar	Rp. 1.966.549.860,-
Ada penambahan mutasi Tahun 2019 sebesar	Rp. 144.697.800,-
Sehingga Peralatan dan Mesin Tahun 2019	Rp. 2.111.247.660,-

Penambahan akun ini bersumber dari penambahan alat peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat komunikasi, instalasi listrik.

- **Bangunan dan Gedung**

Saldo akhir tahun 2018 gedung dan bangunan sebesar	Rp. 2.114.917.976,-
Penambahan Tahun 2019 sebesar	Rp. 2.712.114.450,-
Sehingga gedung dan bangunan Tahun 2019	Rp. 4.827.032.426,-

- **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo akhir tahun 2018 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 18.211.913.630,-
Mutasi Tahun 2019 sebesar	Rp. 11.313.743.085,-
Sehingga jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2019 sebesar	Rp 29.525.656.715,-

- **Aset Tetap Lainnya**

Saldo akhir tahun 2018 Aset Tetap Lainnya sebesar	Rp. 0,-
Mutasi Tahun 2019 sebesar	Rp. 0,-
Sehingga aset tetap lainnya Tahun 2019 sebesar	Rp. 0,-

3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos. Untuk OPD pos kewajiban-nya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran :

- R/K (K) BUD yaitu jumlah SP2D yang terbit selama satu tahun anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 38.055.322.950,-

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Tidak ada hambatan /kendala yang krusial dalam pelaksanaan anggaran OPD tahun 2019. Hanya ada sedikit keterlambatan proses pencairan dana APBD yang berkaitan dengan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

6.2. Saran

1. Peningkatan anggaran dimasa yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas Pembangunan Gedung, Kawasan Permukiman, Infrastruktur dan penyediaan tanah pembangunan.

Painan, 31 Desember 2019

**KEPALA DINAS PERUMAAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001